BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan hasil peninjauan pada Kantor Pemerintah Kota Bandung, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah selalu berkaitan dengan anggaran, dengan demikian jaringan prosedur yang terbentuk dalam sistem akuntansi Pemerintah Daerah berkaitan erat dengan anggaran. Prosedur yang digunakan dalam sistem akuntansi Keuangan Daerah adalah : Prosedur Transfer Kas dari Pemda ke Unit Organisasi. Prosedur Pengeluaran Kass untuk Belanja Administrasi Umum Non Gaji dengan menggunakan PK. Prosedur Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan, Prosedur Belanja Operasi dan Pemeliharaan (kegiatan non investasi) dengan menggunakan PK. Prosedur Belanja Modal dengan menggunakan PK. Prosedur Belanja melalui Beban Tetap, Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Kas dari Pendapatan Asli Daerah.
2. Formulir yang digunakan dan diperlukan dalam Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah adalah : STS (Surat Tanda Setoran), SPP(Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang).

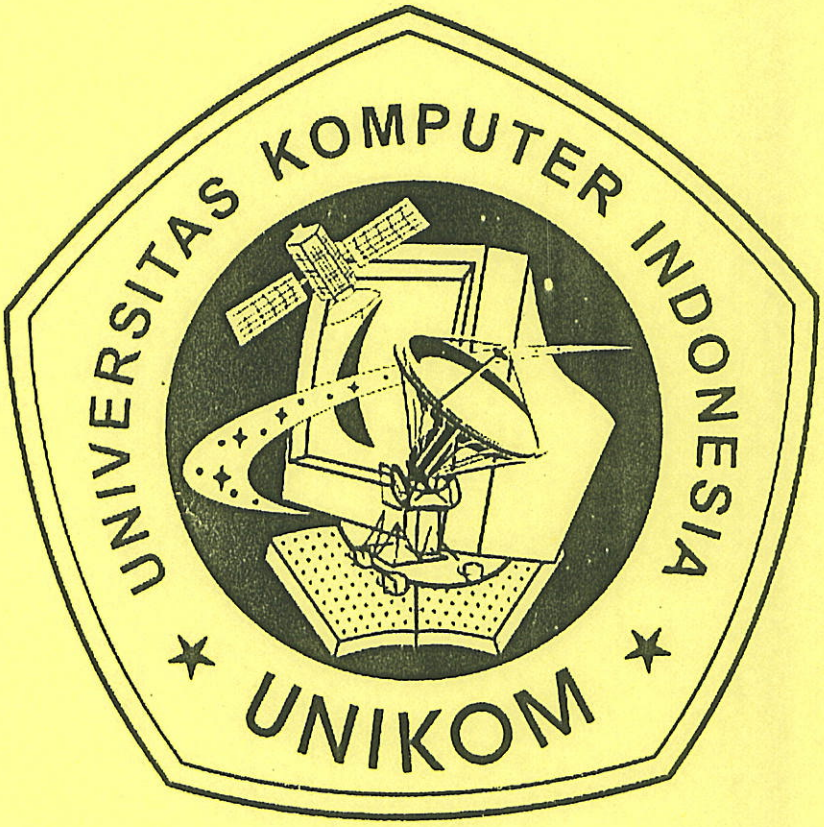
3. Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah disampaikan oleh Kepala Daerah setiap akhir tahun anggaran yang meliputi Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Aliran Kas, dan Neraca Daerah.

4.2 Saran

Setelah melaksanakan Kerja Praktek di Pemerintah Kota Bandung penulis telah menyimpulkan hasil Kerja Praktek, maka selanjutnya penulis akan mengemukakan saran yang mungkin dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bandung.

Adapun saran – saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya diantara setiap bagian – bagian keuangan melaksanakan tugasnya masing – masing dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga terjalin kerja sama yang baik pula serta mempertahankannya.
2. Sebaiknya diadakan pengecekan bahwa formulir – formulir yang digunakan dari Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah telah digunakan secara baik dan lengkap.
3. Sebaiknya Kepala Daerah tetap mempertahankan kinerja yang baik dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta waktu yang telah ditentukan tepat pada waktunya.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM